

BAB I

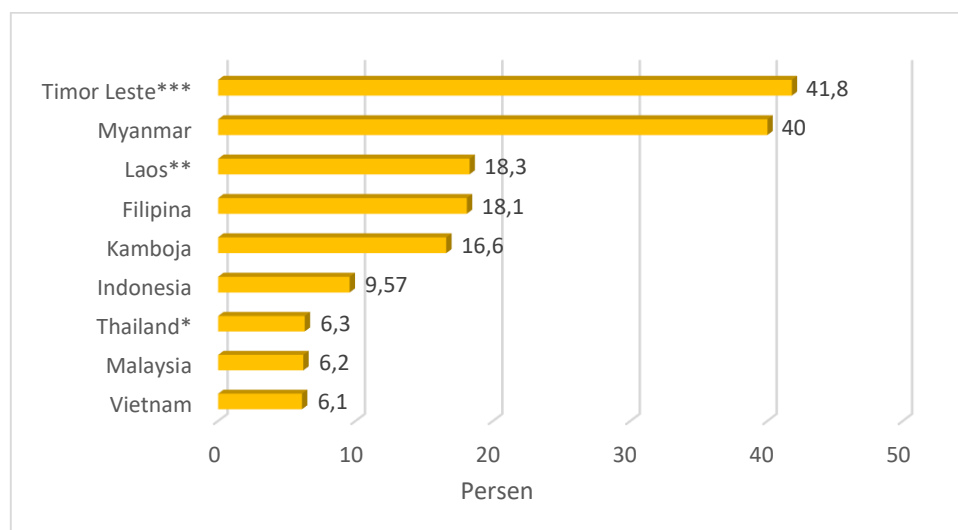
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik itu negara maju ataupun negara berkembang. Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok yang menjadi pusat perhatian pemerintah dari masa ke masa, sehingga banyak perencanaan, kebijakan, serta program pembangunan yang sudah dan akan dilaksanakan untuk mengentaskan masalah tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan kemiskinan mempunyai sifat yang kompleks, yang artinya kemiskinan tidak hanya muncul dengan sendirinya akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai latar belakang (Mihai et al., 2015; Mowafi & Khawaja, 2005). Berhasil atau gagalnya pembangunan, sering diukur berdasarkan perubahan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dalam suatu rumah tangga. Dengan demikian kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan negara.

Dalam arti yang luas, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya serta ketidakmampuan dalam berbagai aspek, seperti sosial, politik, dan rohaninya. Secara umum, kemiskinan dilihat dari perbandingan pada batas garis kemiskinan, yakni dikatakan miskin jika pengeluaran per kapita per bulan lebih rendah dari garis kemiskinan yang telah ditentukan. Bank dunia memperbaharui garis kemiskinan internasional pada bulan September 2022 dari \$1.90 menjadi \$2.15 per orang per hari dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan menggunakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Garis kemiskinan di Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik, 2023). Pengukuran kemiskinan tersebut membedakan yang miskin dengan yang tidak miskin dengan memeriksa tingkat pendapatan atau konsumsi orang yang mengacu pada batas garis tersebut (Mowafi & Khawaja, 2005).

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,57 persen pada 2022. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan terendah keempat di Asia Tenggara. Posisi Indonesia di atas Thailand dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,3 persen pada 2021. Malaysia dan Vietnam mempunyai tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 6,2 persen dan 6,1 persen. Sedangkan, Timor Leste menjadi posisi pertama dengan tingkat kemiskinan paling tinggi sebesar 41,8 persen pada 2014. Myanmar ada di urutan kedua dengan tingkat kemiskinan sebesar 40 persen pada 2022. Kemudian, Laos dan Filipina mempunyai tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 18,3 persen dan 18,1 persen. Sedangkan, Kamboja mempunyai tingkat kemiskinan sebesar 16,6 persen pada tahun 2022. Adapun, tingkat kemiskinan di Singapura dan Brunei Darussalam tidak tersedia.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Beberapa Negara ASEAN

Sumber: *dataindonesia.id*

*)2021 **2018 ***2014

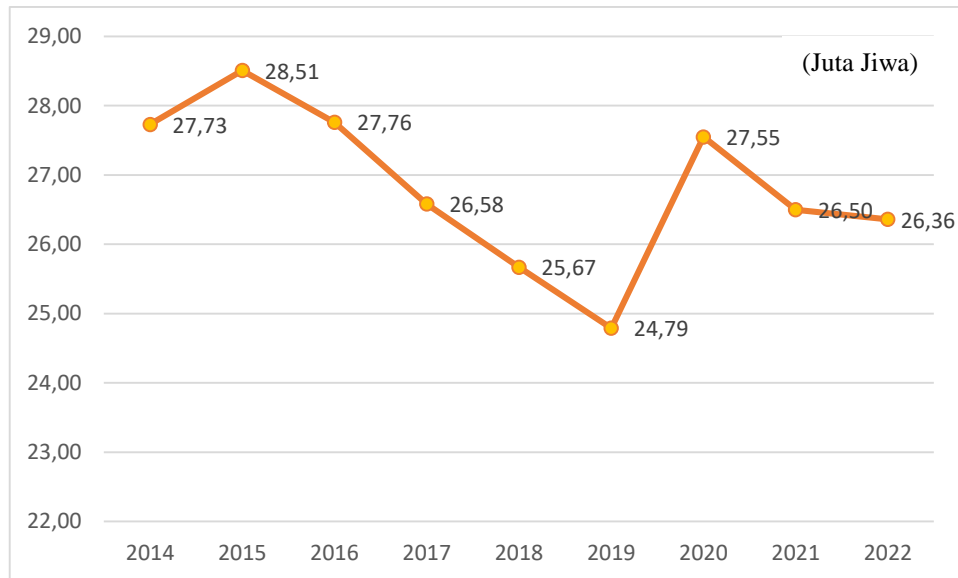
Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa penduduk miskin Indonesia dari di tahun 2014 sebesar 27,73 juta jiwa penduduk miskin dan naik sebesar 28,51 juta jiwa di tahun 2015. Setelah itu, turun setiap tahunnya sampai tahun 2019 dan kembali naik sebesar 27,55 juta jiwa. Data terbaru, di tahun 2022, sebesar 26,36 juta jiwa penduduk miskin. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak negatif bagi masyarakat. Kemiskinan di suatu wilayah dalam jangka panjang akan

Irene Asima Br Lumbantobing, 2023

PENGARUH PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih tinggi, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan nasional.



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat miskin disebabkan karena pekerjaan yang dilakukan tidak memiliki produktivitas yang tinggi (Arndt & Sundrum, 1980). Ragnar Nurkse menjelaskan mengenai lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*), yakni suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Lingkaran setan kemiskinan terjadi bermula dari rendahnya produktivitas. Dalam rendahnya produktivitas akan berakibat kepada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya tabungan dan investasi akan berdampak kepada keterbelakangan dan terjadi ketidaksempurnaan pasar (Jhingan, 1994).

Amartya Sen menyatakan bahwa “kapabilitas untuk berfungsi (*capability to function*)” merupakan hal yang paling berperan untuk menentukan status miskin tidaknya seseorang. Sen mengemukakan bahwa kemiskinan tidak dapat diukur

dengan baik hanya berdasarkan pendapatan, yang paling penting bukanlah apa yang dimiliki seseorang, tetapi siapa atau bisa menjadi apa dirinya dan apa yang dilakukan atau dapat dilakukannya. Keberfungsian seseorang adalah pencapaian (*achievement*), yaitu apa yang dapat dilakukan seseorang dengan komoditas dan karakteristik yang dapat dikendalikannya. Sen mendefinisikan kapabilitas sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan pilihan keberfungsian, yang bergantung pada ciri-ciri pribadinya (pengubahan karakteristik pribadi menjadi keberfungsian atau kiprah dalam masyarakat). Pandangan Sen membantu untuk menjelaskan mengapa para pakar ekonomi pembangunan telah sangat menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Banyak para pakar menyimpulkan bahwa negara-negara yang tingkat pendapatnya tinggi tetapi standar kesehatan dan pendidikannya rendah merupakan negara yang tumbuh tetapi tidak berkembang. Bagi Sen, kesejahteraan manusia berarti menjadi baik, yang dalam pengertian dasar berarti sehat, menyantap makan makanan yang bernutrisi, berpakaian pantas, melek aksara, dan panjang umur (Todaro & Smith, 2011; hlm. 19-22).

Rendahnya pendapatan merupakan cerminan dari rendahnya produktivitas. Produktivitas seseorang dapat dilihat dari kemampuan seseorang yang penting dalam dirinya yakni pendidikan dan kesehatan. Dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai (Todaro & Smith, 2011; hlm. 22). Hal ini serupa dengan Jeffrey Sachs dalam bukunya "*The End of Poverty*" mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2005).

Sehingga, pendidikan dan kesehatan mampu mengurangi kemiskinan. Apabila seseorang berpendidikan rendah maka memperoleh pendapatan yang rendah (Hill, 2021). Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki rata-rata tingkat produktivitas yang lebih tinggi (Mihai et al., 2015). Begitu juga dengan kesehatan. Jika seseorang mempunyai kondisi sehat, maka dapat berkontribusi dalam masyarakat yang dapat bekerja dibandingkan dengan orang

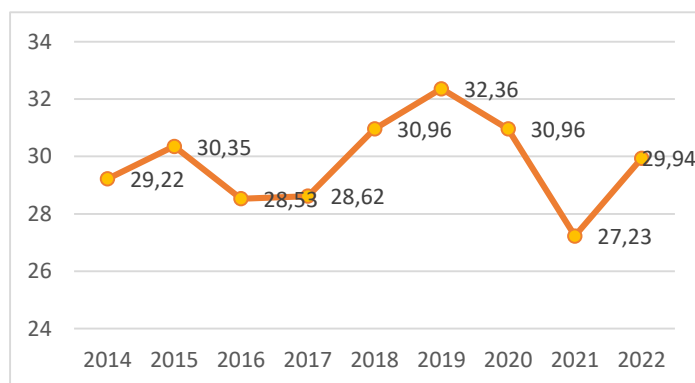
yang sakit yang cenderung tidak masuk kerja (Bloom & Canning, 2003; Strauss & Thomas, 2014).

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Penduduk Usia 15 tahun ke atas

Jenjang Pendidikan	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Tidak/Belum sekolah	5,47	5,9	3,9	4,62	4,38	3,96	3,56	3,31	3,4	
Tidak tamat SD	13,67	12,62	12,27	12,39	13,64	12,66	11,27	10,56	9,09	
SD/ sederajat	27,41	27,79	33,08	28,03	25,63	25,13	24,8	25,1	24,83	
SMP/ sederajat	20,82	21,44	16,49	21,71	21,24	22,31	21,78	22,15	22,56	
SMA/ sederajat	25,18	24,3	26,36	25,1	26,36	26,69	29,1	29,21	29,97	
Perguruan Tinggi	7,46	7,95	7,92	8,15	8,76	9,26	9,49	9,67	10,15	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas di tahun 2022 telah mencapai wajib belajar 9 tahun atau tamatan SMP/ sederajat ke atas. Tamatan pendidikan terbanyak berasal dari SMA/ sederajat dengan persentase 29,97 persen. Kedua terbanyak adalah lulusan SD/ sederajat sebesar 24,83 persen, disusul dengan jenjang sekolah SMP/ sederajat sebanyak 22,74 persen. Akan tetapi, proporsi pada perguruan tinggi masih tergolong kecil hanya 10,15 persen di tahun 2022.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir di Indonesia (2014-2022)

Sumber: Badan Pusat Statisti (BPS), data diolah

Tingkat kesehatan tidak hanya dapat dilihat dari hasil pemeriksaan kesehatan secara medis, namun dapat juga berdasarkan *Self-Assesed Health* atau pengukuran kesehatan melalui pernyataan subjektif individu terhadap status kesehatan. Pada Susenas, tingkat kesehatan dilihat melalui keluhan kesehatan dan

Irene Asima Br Lumbantobing, 2023

PENGARUH PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

angka kesakitan yang didasarkan pada penilaian individu terhadap kondisi kesehatannya. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari (Badan Pusat Statistik, 2021). Gambar 1.3 menunjukkan bahwa persentase penduduk mempunyai keluhan kesehatan sebesar 29,94 persen. Hal ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 27,23 persen.

Berdasarkan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), pemerintah Indonesia telah dan sedang berupaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 persen sampai 10 persen pada akhir tahun 2014. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif. Bentuk program tersebut diantaranya ada Bantuan Pangan Non Tunai, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan Program Keluarga Harapan. Kebijakan-kebijakan tersebut masih sepenuhnya belum dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Masih terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan kenyataannya.

Secara empiris, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji bagaimana pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiari & Meisami (2010) mengkaji dampak dari dua komponen modal manusia, yakni kesehatan dan pendidikan terhadap kemiskinan di negara-negara Islam. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan dan status kesehatan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Dalam hal pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan, Patrick et al. (1988) menjelaskan bahwa masih terdapat perdebatan mengenai apakah kemiskinan yang mempengaruhi kesehatan atau kesehatan yang mempengaruhi kemiskinan, namun pendapatan yang rendah sering dikaitkan

dengan status kesehatan yang buruk. Case et al. (2005) membuktikan bahwa terjadi pengaruh besar pada peningkatan kesehatan terhadap produktivitas yang berujung pada pendapatan. Kesehatan dan kelaparan anak yang buruk menyebabkan kinerja sekolah yang buruk dan karenanya, terjadi ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik (Murray, 2006). Peters et al. (2008) menjelaskan bahwa orang yang berada di negara miskin cenderung mempunyai akses yang lebih sedikit ke layanan kesehatan. Meskipun terdapat perbaikan dalam menyediakan akses ke layanan kesehatan di negara berkembang, akan tetapi sebagian besar memiliki akses terbatas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bilenkisi et al. (2015) dan Çitak & Duffy (2020) menemukan bahwa adanya hubungan negatif antara kemungkinan rumah tangga menjadi miskin dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga di Turki. Dengan kata lain, risiko rumah tangga miskin di Turki menurun ketika tingkat pendidikan rumah tangga meningkat. Hal ini sesuai juga dengan pada penelitian yang dilakukan oleh Arsani et al. (2020) bahwa pengembalian dari pendidikan tinggi secara signifikan lebih tinggi daripada pengembalian dari tingkat dasar dan menengah. Hal ini mengartikan bahwa untuk mencapai pendapatan yang lebih tinggi, orang harus meningkatkan tingkat pendidikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Athoillah et al. (2022) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang demi kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Sebagai contoh, program wajib sekolah 12 tahun merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai hal tersebut. Secara teoritis, semakin lama seseorang mengenyam pendidikan maka akan semakin baik pula tingkat kemampuan individu tersebut dalam menyelesaikan tugas dan permasalahannya. Hal ini membuat kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arisetyawan et al. (2019) menunjukkan bahwa kecenderungan rumah tangga dalam kesejahteraan yang baik diterima oleh rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan SMA ke bawah. Risiko tidak sejahtera justru dimiliki oleh kepala rumah tangga yang berpendidikan SMA sampai perguruan tinggi. Hal ini berbeda dengan ekspektasi yakni kepala rumah tangga yang berpendidikan SMA sampai perguruan tinggi

seharusnya menjadi rumah tangga yang sejahtera, artinya jauh dari kemiskinan. Akan tetapi, justru penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realita. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Effendi (2019) juga menunjukkan bahwa meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, pendidikan ternyata masih belum mencerminkan adanya perbaikan kemampuan dan keterampilan masyarakat sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini juga terjadi dikarenakan adanya perbedaan kualitas pendidikan di setiap wilayah yang menyebabkan sumber daya manusia yang dihasilkan berbeda, serta perbedaan kualitas pendidikan seperti fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan rendahnya kualitas pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati et al. (2019) menemukan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga. Ini artinya sekalipun terjadi peningkatan pendidikan kepala rumah tangga belum bisa menentukan suatu rumah tangga tingkat kemiskinannya akan menurun. Begitu juga dengan kesehatan, terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realita. Penelitian yang dilakukan oleh Islami & Anis (2019) menjelaskan bahwa kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini tidak menjamin seseorang dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur melalui angka harapan hidup. Saat seseorang yang termasuk dalam usia bekerja akan tetapi mempunyai penyakit, akan menjadi faktor yang sulit untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan menggunakan pijakan empiris dan teoritis serta dengan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian replikasi dan meneliti bagaimana pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sehingga, peneliti memberi judul “Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia.”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan

berdampak negatif bagi masyarakat, terhambatnya pembangunan nasional menjadi dampak jangka panjang di suatu negara. Berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin diantaranya ada pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini dapat menyebabkan masyarakat dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji teori lingkaran setan kemiskinan oleh Ragnar Nurkse dan teori kapabilitas dari Amartya Sen dengan menganalisis pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. Teori tersebut menekankan bahwa terjadinya lingkaran setan kemiskinan bermula pada rendahnya produktivitas. Pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang dapat memutuskan rantai lingkaran setan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Kemudian, penelitian ini dapat menjadikan referensi bahan kajian dan perkembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara khusus bagi pemerintah yang menjadi penentu kebijakan, yang diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dalam merancang kebijakan untuk dapat mengurangi kemiskinan.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini merujuk pada pedoman karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN HIPOTESIS

Bagian kajian pustaka menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian menjelaskan mengenai objek penelitian, metode penelitian, desain penelitian yang terdiri dari definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil penelitian yang memuat deskripsi subjek penelitian, deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan serta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bagian bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil penelitian dan juga memuat mengenai implikasi serta rekomendasi dari hasil penelitian, baik untuk pihak yang membutuhkan ataupun penelitian selanjutnya.